

BAB II

ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK (AIIB) SEBAGAI INSTRUMEN STRATEGI SOFT POWER TIONGKOK

Dalam konteks interaksi global yang semakin kompleks, diplomasi tidak lagi terbatas pada penggunaan kekuatan koersif atau ekonomi semata, melainkan juga mencakup upaya memperluas pengaruh melalui daya tarik dan kerjasama konstruktif, yang dikenal sebagai *soft power*. Tiongkok, sebagai kekuatan ekonomi yang terus berkembang, telah secara aktif memanfaatkan lembaga-lembaga keuangan multilateral sebagai alat strategis untuk memperkuat pengaruhnya di dunia internasional. Salah satu manifestasi paling jelas dari strategi ini adalah pembentukan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), yang tidak hanya bertujuan menyediakan sumber pembiayaan infrastruktur bagi negara-negara berkembang, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi ekonomi yang mendukung Belt and Road Initiative (BRI). Melalui AIIB, Tiongkok berupaya memperkuat posisinya sebagai aktor kunci dalam tata kelola ekonomi global, sambil meningkatkan legitimasi internasionalnya (Wilson, 2017).

Bab ini secara umum membahas bagaimana Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) berperan sebagai instrumen *soft power* Tiongkok dalam memperluas pengaruhnya di Indonesia melalui pembangunan infrastruktur. Pada bagian awal, diuraikan latar belakang pembentukan AIIB, yang merupakan respons Tiongkok terhadap ketidakpuasan terhadap dominasi lembaga keuangan internasional tradisional seperti *World Bank* dan *Asian Development Bank* (ADB). AIIB

diciptakan dengan tujuan untuk memperkuat peran negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam pembangunan infrastruktur, sekaligus meningkatkan daya saing Tiongkok dalam tata kelola keuangan global.

2.1 Sejarah Pembentukan AIIB

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) didirikan sebagai respon terhadap defisit investasi infrastruktur di kawasan Asia, terutama di negara-negara berkembang. Pada 2013, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengusulkan pendirian lembaga keuangan baru yang berfokus pada pembiayaan infrastruktur regional dalam pidatonya di *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) di Bali. Tiongkok menyatakan bahwa lembaga-lembaga keuangan internasional yang ada seperti *World Bank* dan *Asian Development Bank* (ADB) belum mampu secara optimal menjawab tantangan pembiayaan infrastruktur di Asia yang tumbuh pesat, sehingga pendirian AIIB dirancang untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan tersebut.

Menurut Xi Jinping, pembangunan infrastruktur yang terfragmentasi di Asia menghambat integrasi ekonomi dan perdagangan yang lebih luas, sehingga diperlukan lembaga yang mampu memperkuat konektivitas regional. Berdasarkan data dari *Asian Development Bank* tahun 2017, kawasan Asia membutuhkan lebih dari USD 1,7 triliun per tahun hingga 2030 untuk memenuhi kebutuhan infrastrukturnya, yang menggambarkan kesenjangan besar yang ingin dijembatani oleh AIIB (Sun, 2019). Kesadaran akan pentingnya pembangunan infrastruktur yang terintegrasi secara regional ini menjadi dasar kuat bagi Tiongkok untuk

memimpin pendirian AIIB sebagai respon terhadap kesenjangan infrastruktur yang meluas di negara-negara berkembang.

Proses pembentukan AIIB berlangsung cukup cepat, pada tahun 2014 terdapat 21 negara yang menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk membentuk bank ini. Negara-negara anggota pendiri termasuk Tiongkok, India, dan beberapa negara ASEAN seperti Indonesia dan Thailand. Pada 2015, kesepakatan final mengenai pembentukan AIIB dicapai dengan diikuti oleh lebih dari 50 negara anggota pendiri. AIIB resmi beroperasi pada Januari 2016 dengan kantor pusat di Beijing dan modal awal sebesar USD 100 miliar, menjadikannya salah satu bank multilateral terbesar di dunia. Tiongkok sebagai inisiator dan penyumbang modal terbesar memiliki pengaruh dominan dalam proses pengambilan keputusan di AIIB (Ren, 2017).

Pembentukan AIIB tidak hanya dilandasi motif ekonomi, tetapi juga didorong oleh faktor geopolitik. Negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Jepang pada awalnya skeptis terhadap bank ini, melihat AIIB sebagai alat Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya di Asia. Namun beberapa negara sekutu AS seperti Inggris, Jerman, dan Prancis, memutuskan untuk bergabung sebagai anggota pendiri AIIB, yang mencerminkan urgensi kebutuhan akan pendanaan infrastruktur di Asia serta keterbatasan lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya seperti ADB dan *World Bank*. Langkah ini diinterpretasikan sebagai pengakuan terhadap kebutuhan mendesak akan pendanaan infrastruktur di Asia

serta keterbatasan lembaga-lembaga keuangan internasional yang sudah ada (Morris, 2016).

Sinergi antara AIIB dan Inisiatif Belt and Road (BRI) Tiongkok juga mencerminkan strategi besar Tiongkok dalam memperluas jangkauan geopolitiknya melalui diplomasi ekonomi. AIIB dipandang sebagai salah satu instrumen penting untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur yang sejalan dengan BRI, yang mencakup pembangunan jalur transportasi, energi, dan komunikasi yang menghubungkan Tiongkok dengan kawasan Asia, Afrika, dan Eropa. Dengan demikian, AIIB tidak hanya berperan sebagai bank pembangunan multilateral, tetapi juga sebagai alat *soft power* Tiongkok untuk memperkuat pengaruhnya di negara-negara berkembang.

Selain itu, AIIB memungkinkan Tiongkok untuk memperlihatkan komitmen globalnya terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Dalam pidato-pidatonya, Presiden Xi Jinping sering menekankan pentingnya AIIB dalam mempromosikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan agenda global seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs). AIIB juga dirancang untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan multilateral lainnya, seperti ADB dan *World Bank* dalam mendanai proyek-proyek infrastruktur besar yang memerlukan kolaborasi lintas negara dan lembaga. Kehadiran AIIB memungkinkan Tiongkok memperkuat kerangka kerja keuangannya di tingkat global sekaligus meningkatkan citra sebagai negara yang berkomitmen untuk pembangunan ekonomi di kawasan (Chin, 2019).

Motivasi Tiongkok dalam mendirikan AIIB juga tidak dapat dipisahkan dari konteks geopolitik dan geostrategis. AIIB didirikan pada saat kekuatan ekonomi global mulai bergeser ke Asia, khususnya dengan kebangkitan ekonomi Tiongkok yang pesat. Pembentukan AIIB mencerminkan upaya Tiongkok untuk memperkuat citra positifnya di mata dunia internasional, terutama di kawasan Asia. AIIB tidak hanya menjadi alat diplomasi ekonomi, tetapi juga diplomasi politik dan budaya. Dengan mendukung proyek-proyek pembangunan yang strategis dan berkelanjutan. Melalui AIIB Tiongkok ingin menegaskan peranannya sebagai pemimpin global dalam pembangunan infrastruktur. Selain itu, AIIB juga berperan sebagai alternatif terhadap lembaga-lembaga keuangan konvensional seperti *World Bank* dan *International Monetary Fund* (IMF), yang seringkali memberlakukan syarat-syarat ketat terhadap negara-negara penerima pinjaman.

Pemilihan AIIB sebagai kanal utama *soft power* berkaitan dengan struktur lembaga ini yang menunjukkan dominasi Tiongkok secara simbolik maupun substantif. Tiongkok merupakan pemegang saham terbesar dan menempatkan warga negaranya sebagai presiden AIIB pertama (Liu & Umehara, 2017). Namun dominasi ini dibalut dalam kerangka multilateral yang terbuka, yang memungkinkan partisipasi luas lebih dari 100 negara anggota. Melalui skema seperti *co-financing* bersama ADB dan World Bank, Tiongkok memperlihatkan kemampuannya memadukan kekuatan ekonomi dengan konsensus internasional. Dalam konteks Indonesia, pendanaan proyek seperti Perbaikan Wilayah Kumuh (KOTAKU), Bendungan Karian dan Jatigede, serta pengembangan kawasan

Mandalika menjadi manifestasi nyata dari strategi Tiongkok untuk memperoleh simpati dan pengaruh melalui pendekatan pembangunan (Liao, 2018).

Secara praktis, Tiongkok memperoleh dua manfaat utama. Pertama, AIIB menjadi saluran ekspansi ekonomi melalui penyaluran surplus modal dan tenaga kerj. Kedua, lembaga ini meningkatkan legitimasi internasional Tiongkok sebagai pemimpin pembangunan global (Keohane, 1984; Kaloko, 2021). Sinergi antara AIIB dan Belt and Road Initiative (BRI) juga menunjukkan konsolidasi kepentingan geopolitik dan ekonomi Tiongkok di Asia Tenggara.

2.2 Tujuan, Fungsi, dan Keanggotaan AIIB

AIIB saat didirikan memiliki modal dasar sebesar USD 100 miliar, yang dibagi menjadi satu juta saham dengan nominal USD 100.000 per saham. Struktur modal ini menggambarkan skema kepemilikan yang berfokus pada negara-negara regional di Asia, dimana 75% saham AIIB dipegang oleh anggota yang berasal dari kawasan ini (Liu & Umehara, 2017). Distribusi modal yang demikian mencerminkan pentingnya keterlibatan regional dalam tata kelola dan arah kebijakan investasi bank. Modal ini tidak hanya bersumber dari kontribusi negara anggota, tetapi juga diperoleh melalui instrumen-instrumen keuangan lainnya seperti penerbitan obligasi di pasar modal global. Hal ini memberi fleksibilitas lebih bagi AIIB dalam menambah likuiditas untuk proyek-proyek infrastruktur di negara-negara berkembang.

Secara struktural AIIB adalah lembaga keuangan multilateral yang terdiri dari 109 anggota dari berbagai benua, termasuk negara-negara besar seperti Jerman,

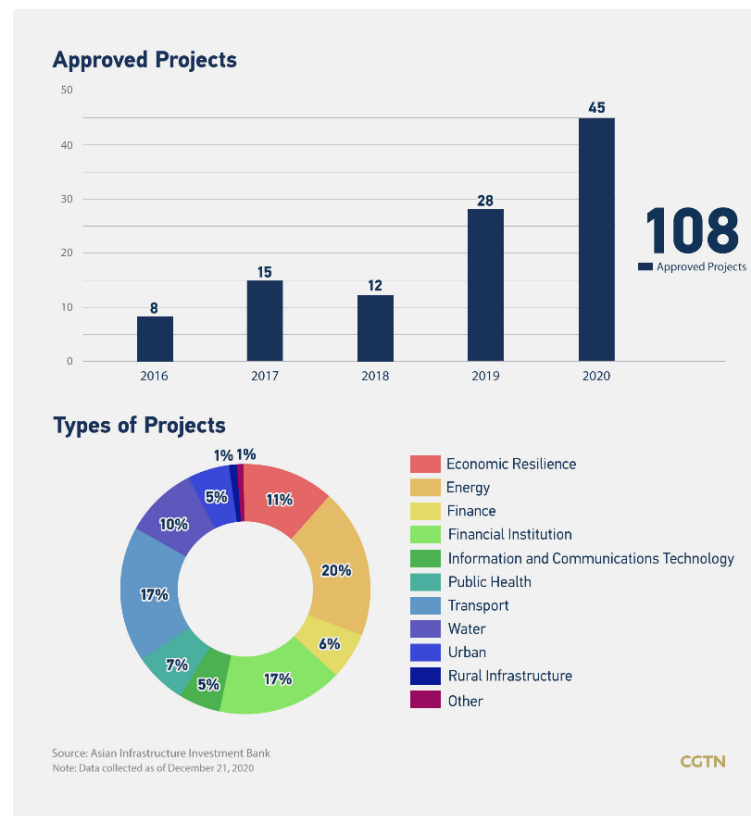
Prancis, dan Inggris. Namun, peran dominan tetap dipegang oleh Tiongkok yang menyumbang sekitar 30% dari total modal dasar AIIB, sehingga memberikan Tiongkok pengaruh besar dalam pengambilan keputusan strategis. Struktur voting di AIIB didasarkan pada kontribusi modal, yang berarti bahwa semakin besar modal yang disumbangkan oleh suatu negara, semakin besar pula hak suaranya dalam keputusan-keputusan strategis bank (AIIB, 2021). Meski banyak pihak melihat AIIB sebagai sarana bagi Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya, bank ini juga tetap mengutamakan inklusivitas dan multilateralitas dalam operasionalnya.

Dalam *Articles of Agreement* AIIB, tercantum tujuan utama AIIB yaitu mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Asia melalui investasi infrastruktur. Fokus AIIB adalah pada pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang bersifat produktif dan strategis, seperti pembangunan transportasi, energi, air, dan telekomunikasi, serta proyek yang mendukung integrasi ekonomi regional. Hingga tahun 2021, AIIB telah menyetujui lebih dari 100 proyek senilai lebih dari USD 19,6 miliar di berbagai negara anggota, termasuk Indonesia. AIIB bertujuan untuk menjadi lembaga keuangan yang lebih fleksibel dan responsif dalam memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang, yang seringkali tidak terakomodasi oleh lembaga-lembaga keuangan tradisional seperti *World Bank* dan ADB (Wang, 2020).

AIIB berfokus pada pendanaan proyek-proyek infrastruktur yang berkelanjutan, mulai dari pembangunan jalan raya, pelabuhan, rel kereta api, hingga proyek energi hijau. AIIB tidak hanya mendanai proyek-proyek ini, tetapi juga

memastikan bahwa proyek-proyek tersebut selaras dengan agenda global seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan komitmen terhadap *Paris Agreement* (UNFCCC, 2015). Pada 2020, AIIB telah menyetujui lebih dari USD 19,6 miliar dalam bentuk pinjaman dan investasi kepada lebih dari 100 proyek di negara-negara anggota (AIIB, 2020). Dengan demikian, AIIB bukan hanya sebuah institusi keuangan, tetapi juga instrumen diplomasi pembangunan yang mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan dan inklusivitas.

Fungsi AIIB tidak hanya terbatas pada penyediaan dana untuk proyek-proyek infrastruktur, tetapi juga memberikan dukungan teknis dan konsultasi untuk memastikan proyek tersebut berjalan sesuai dengan standar internasional. Selain itu, AIIB berusaha untuk meningkatkan kapasitas negara-negara anggota dalam mengelola proyek infrastruktur secara efektif dan berkelanjutan. Bank ini juga mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembiayaan proyek, dengan harapan dapat meningkatkan keterlibatan investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang (AIIB, 2021).

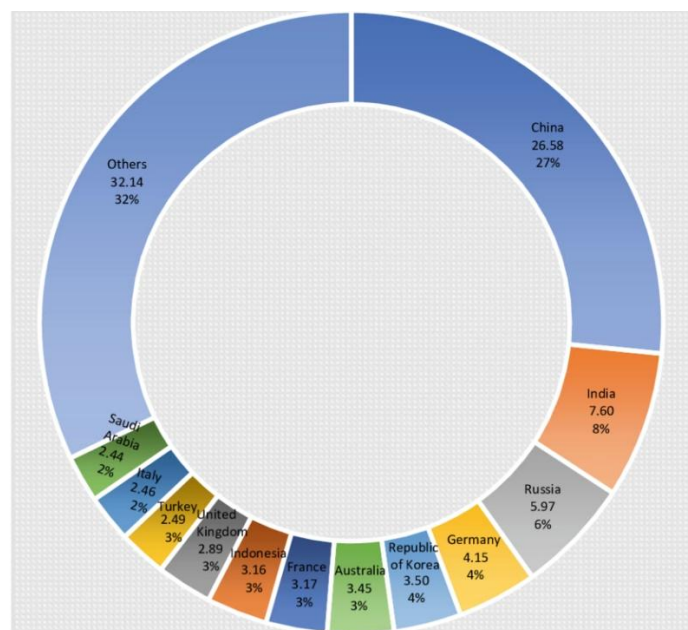


Gambar 2. 1 Grafik Proyek yang didanai AIIB

Sumber: CGTN, 2021

Keanggotaan AIIB bersifat inklusif dan terbuka untuk negara-negara di luar kawasan Asia. Pada 2021, AIIB telah memiliki 109 anggota dari berbagai benua, yang mencakup negara-negara besar seperti Inggris, Jerman, dan Kanada. Dalam hal struktur tata kelola, AIIB mengadopsi sistem voting berbasis jumlah saham yang dimiliki setiap negara anggota. Tiongkok sebagai pemegang saham terbesar dengan kepemilikan saham sebesar 28%, juga memiliki hak suara tertinggi dalam pengambilan keputusan. Dengan besaran hak suara tersebut, Tiongkok memiliki pengaruh yang signifikan dalam berbagai keputusan strategis, termasuk penerimaan anggota baru dan pemilihan presiden AIIB. India dan Rusia, yang memiliki hak

suara masing-masing sebesar 8% dan 6%, menduduki peringkat kedua dan ketiga dalam hierarki hak suara. Namun, karena keputusan besar di AIIB membutuhkan persetujuan minimal 75% suara mayoritas, posisi Tiongkok sebagai pemilik hak veto menjadi sangat krusial dalam menentukan arah kebijakan dan strategi AIIB, mirip dengan dominasi Amerika Serikat dalam struktur *World Bank* (Liu & Umehara, 2017).



Gambar 2. 2 Grafik Kepemilikan Saham AIIB

Sumber: Asian Infrastructure Investment Bank, 2019

Tabel diatas menunjukkan struktur kepemilikan saham dalam AIIB yang dikuasai oleh Tiongkok sebagai kontributor modal terbesar dengan 27% total hak suara. Sistem ini mengadopsi mekanisme suara proporsional, sehingga memberikan Tiongkok posisi strategis, termasuk hak veto dalam pengambilan keputusan besar seperti keanggotaan dan alokasi proyek. Meskipun AIIB diklaim memiliki tata kelola inklusif, dominasi Tiongkok tetap mencolok dan mencerminkan sinerginya

dengan Belt and Road Initiative (BRI) dalam memperluas pengaruh ekonominya di Asia Tenggara

Tata kelola AIIB terbagi dalam beberapa lapisan, dimulai dari Dewan Gubernur yang bertindak sebagai pengambil keputusan tertinggi, hingga Dewan Direksi yang mengawasi operasi sehari-hari bank. Dewan Gubernur memiliki wewenang untuk memutuskan keanggotaan, pemilihan presiden, dan alokasi modal. Di bawahnya, Dewan Direksi mengatur operasional harian AIIB, termasuk menyusun anggaran, menetapkan kebijakan operasional, dan memastikan pelaksanaan proyek sesuai dengan visi strategis bank. AIIB juga dipimpin oleh presiden yang dipilih oleh Dewan Gubernur, dan dibantu oleh tim manajemen senior yang terdiri dari lima wakil presiden dengan bidang tanggung jawab masing-masing (Beniflah, 2016).

Dalam rangka mendukung pelaksanaan strateginya, AIIB memiliki panel penasehat internasional yang memberikan masukan terkait kebijakan dan strategi bank. Panel ini terdiri dari individu-individu yang memiliki keahlian dan pengalaman profesional dalam bidang keuangan, ekonomi, dan pembangunan internasional. Panel ini bertugas memberikan masukan strategis kepada presiden dan manajemen senior untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi operasional AIIB di tengah dinamika global. Kehadiran panel ini merupakan salah satu upaya AIIB untuk memastikan bahwa operasionalnya sesuai dengan standar internasional yang tinggi dan sejalan dengan kebutuhan negara-negara anggota yang beragam (Steffen, 2015).

Sebagai bank multilateral, AIIB memiliki struktur pengambilan keputusan yang relatif inklusif. Meskipun Tiongkok adalah kontributor modal terbesar, bank ini beroperasi berdasarkan sistem suara proporsional, dimana setiap negara anggota memiliki hak suara berdasarkan kontribusi modal mereka. Namun, meskipun demikian, Tiongkok tetap memiliki pengaruh signifikan karena mengendalikan sekitar 26% dari total hak suara (Xie, 2017). Ini menjadikan AIIB sebagai alat penting dalam strategi diplomasi ekonomi Tiongkok. AIIB juga berfungsi sebagai alat penting dalam diplomasi keuangan Tiongkok, terutama dalam konteks Belt and Road Initiative (BRI). Dalam banyak kasus, AIIB bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya, seperti Asia Development Bank (ADB) dan *World Bank*, untuk bersama-sama mendanai proyek-proyek infrastruktur besar yang sejalan dengan tujuan BRI.

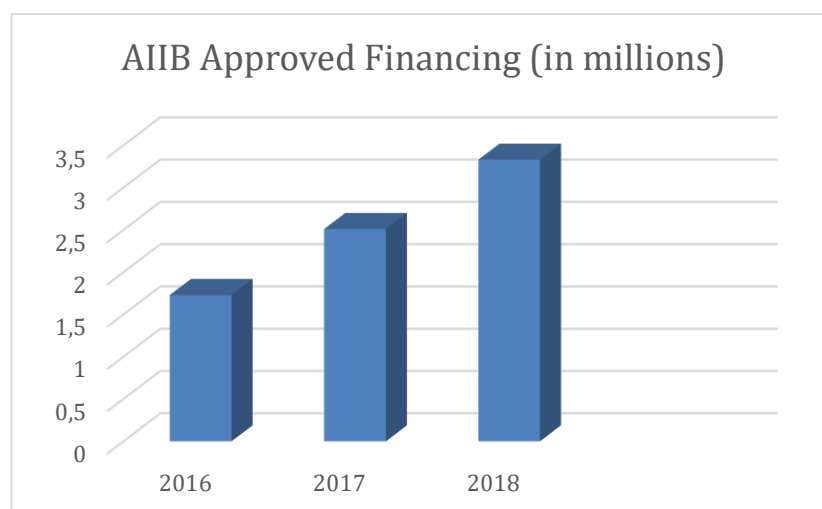
Indonesia resmi bergabung menjadi anggota pendiri AIIB pada Oktober 2014 setelah menandatangani nota kesepahaman bersama 21 negara lain di Beijing (Ren, 2017). Proses ratifikasi di DPR RI selesai pada Mei 2015, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyetoran modal awal USD 1 miliar pada peluncuran operasional AIIB Januari 2016. Keputusan ini didasari kebutuhan mendesak akan tambahan sumber pendanaan infrastruktur dalam rangka Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), serta keinginan memperkuat posisi Indonesia dalam forum keuangan internasional baru yang tidak didominasi oleh Barat, serta mempererat hubungan ekonomi dengan Tiongkok tanpa harus secara eksplisit bergantung pada BRI (Liao, 2018).

2.3 Diplomasi Ekonomi Terintegrasi AIIB dengan Belt and Road Initiative (BRI)

Korelasi antara Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan Belt and Road Initiative (BRI) menegaskan ambisi strategis Tiongkok dalam memperluas pengaruh ekonominya di Asia, serta menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan infrastruktur global yang berkelanjutan. BRI, yang diluncurkan oleh Presiden Xi Jinping pada 2013, merupakan mega-proyek global yang bertujuan menghubungkan Tiongkok dengan lebih dari 60 negara melalui jaringan transportasi, energi, dan komunikasi, serta menciptakan koridor ekonomi yang memfasilitasi perdagangan dan investasi internasional. AIIB, dalam konteks ini, berfungsi sebagai instrumen utama pendanaan bagi proyek-proyek infrastruktur yang berhubungan dengan inisiatif BRI.

BRI dibagi menjadi dua jalur besar: *Silk Road Economic Belt* yang menghubungkan Tiongkok dengan Eropa melalui Asia Tengah dan Timur Tengah, serta *21st Century Maritime Silk Road*, yang menghubungkan Tiongkok dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, Afrika, dan Eropa melalui jalur laut. Proyek-proyek yang berada di bawah payung BRI, seperti pembangunan rel kereta api, jalan raya, pelabuhan, dan jaringan pipa energi, membutuhkan investasi besar yang sebagian besar didanai oleh AIIB. Salah satu contoh nyata adalah proyek jalur kereta api Tiongkok-Laos senilai USD 6 miliar, yang didanai sebagian oleh AIIB. Proyek ini merupakan bagian dari konektivitas darat BRI yang bertujuan untuk menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tenggara

Peran AIIB dalam mendanai proyek-proyek infrastruktur BRI menunjukkan sinergi yang jelas antara kedua inisiatif ini. AIIB dengan fokus utamanya pada pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang, memberikan fleksibilitas finansial yang diperlukan untuk melaksanakan proyek-proyek besar BRI, yang seringkali melibatkan pembangunan infrastruktur di negara-negara dengan keterbatasan akses terhadap sumber pendanaan internasional. AIIB tidak hanya menyediakan pembiayaan yang lebih mudah dan cepat dibandingkan lembaga keuangan multilateral lainnya, tetapi juga lebih selaras dengan agenda geopolitik Tiongkok dalam memperluas pengaruhnya di kawasan strategis Asia, Afrika, dan Eropa Timur. Salah satu contoh konkrit adalah proyek kereta cepat yang menghubungkan Tiongkok dengan Laos, yang didanai sebagian oleh AIIB. Proyek ini bernilai sekitar USD 6 miliar dan merupakan bagian dari jalur darat BRI yang menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tenggara (AIIB, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa AIIB dan BRI bekerja secara sinergis untuk memperkuat konektivitas antar negara dan memperluas jalur perdagangan global.



Gambar 2. 3 Grafik Total Pembiayaan oleh AIIB

Sumber: Asian Infrastructure Investment Bank, 2019

Dalam perspektif geopolitik, AIIB dan BRI secara bersamaan memungkinkan Tiongkok memperkuat posisinya di jalur perdagangan global, sambil meningkatkan akses terhadap sumber daya alam dan pasar baru di negara-negara berkembang. Negara-negara yang menerima pendanaan dari AIIB, terutama di bawah kerangka BRI, cenderung mempererat hubungan bilateral mereka dengan Tiongkok, baik dari segi ekonomi maupun diplomatik. Hal ini memberikan keuntungan geopolitik bagi Tiongkok dalam memperluas pengaruhnya di kawasan-kawasan yang sebelumnya didominasi oleh kekuatan Barat, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa (Hillman, 2020).

Selain aspek ekonomi, AIIB dan BRI juga mencerminkan strategi *soft power* Tiongkok dalam membentuk citra positifnya di mata dunia. Strategi *soft power* Tiongkok tercermin dalam implementasi AIIB dan BRI. Melalui pendanaan proyek-proyek infrastruktur yang strategis, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, Tiongkok membangun citra sebagai negara yang proaktif dalam mendukung pembangunan global dan melindungi lingkungan. AIIB khususnya didesain untuk beroperasi dengan standar internasional yang tinggi, baik dalam hal transparansi, tata kelola, maupun keberlanjutan proyek. Hal ini sejalan dengan komitmen global terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan *Paris Agreement* dalam memerangi perubahan iklim.

AIIB dan BRI tidak hanya berfungsi sebagai instrumen diplomasi ekonomi, tetapi juga sebagai alat diplomasi politik. Melalui AIIB, Tiongkok mampu

memperkuat legitimasi politiknya di panggung internasional, menarik negara-negara Eropa, Afrika, dan Asia ke dalam lingkaran pengaruhnya. Inisiatif ini memperkuat posisinya sebagai kekuatan global yang dominan di kawasan Asia dan sekitarnya, serta memungkinkan Tiongkok memainkan peran yang lebih besar dalam tata kelola ekonomi global. Seperti yang dikemukakan oleh Hillman (2020), sinergi antara AIIB dan BRI tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperluas pengaruh geopolitik Tiongkok di kawasan strategis

BRI dan AIIB melalui diplomasi ekonomi terintegrasi menawarkan Tiongkok peluang untuk memperkuat kerjasama bilateral dengan negara-negara mitra. Dalam banyak proyek yang didanai AIIB di bawah kerangka BRI, perusahaan-perusahaan Tiongkok terlibat secara langsung dalam pembangunan dan pengelolaan proyek, yang memberikan keuntungan ekonomi langsung bagi Tiongkok. Selain itu, proyek-proyek ini juga membuka ruang bagi Tiongkok untuk memperkuat kerja sama politik dan diplomatik dengan negara-negara penerima pendanaan. Korelasi antara AIIB dan BRI menjadi bukti konkret bagaimana Tiongkok menggunakan diplomasi ekonomi untuk memperkuat posisinya di panggung internasional, baik dalam ranah ekonomi, politik, maupun budaya. Sinergi ini memperlihatkan bahwa Tiongkok tidak hanya menjadi aktor ekonomi utama di Asia, tetapi juga sedang mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin global dalam pembangunan infrastruktur dan diplomasi ekonomi. Dengan mengintegrasikan AIIB ke dalam strategi BRI, Tiongkok telah berhasil menciptakan kerangka kerja yang mendukung perluasan pengaruhnya di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang yang membutuhkan dukungan

infrastruktur yang mendesak. Pendekatan Tiongkok dalam menggunakan AIIB sebagai kanal diplomasi ekonomi juga sejalan dengan logika ekspansi budaya, yang menempatkan infrastruktur sebagai alat ekspansi nilai dan pengaruh, sebagaimana dalam konteks lain budaya disebut sebagai “jiwa” turisme dan turisme adalah “pembawa” budaya (Yasa, Windiani, & Wahyudi, 2023).

2.4 AIIB Sebagai Instrumen Soft Power Tiongkok

Dalam konteks hubungan internasional, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan multilateral, tetapi juga sebagai salah satu instrumen *soft power* yang signifikan bagi Tiongkok. *Soft power* merupakan sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Joseph Nye (2004), mengacu pada kemampuan suatu negara untuk menarik dan mempengaruhi negara lain tanpa menggunakan kekuatan militer atau koersif. Sebagai aktor besar di kawasan Asia, Tiongkok memanfaatkan AIIB untuk membangun citra positif sebagai negara yang mendukung pembangunan global, serta menguatkan posisinya diantara lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya seperti *World Bank* dan *Asian Development Bank* (ADB)

Konsep *soft power*, sebagaimana diperkenalkan oleh Joseph Nye (2004), menjadi kerangka utama untuk memahami strategi diplomasi Tiongkok yang diimplementasikan melalui AIIB. *Soft power* merujuk pada kemampuan sebuah negara untuk menarik dan mempengaruhi negara lain melalui daya tarik nilai-nilai, budaya, dan kebijakan, tanpa menggunakan paksaan atau kekuatan militer.

Tiongkok menggunakan AIIB untuk memperluas pengaruh ekonominya secara strategis melalui pembiayaan proyek infrastruktur di negara-negara berkembang, terutama di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dengan menawarkan model pendanaan yang lebih fleksibel dibandingkan lembaga keuangan internasional yang didominasi negara-negara Barat, seperti IMF dan *World Bank*, AIIB menjadi daya tarik bagi negara-negara berkembang. Proyek-proyek yang didanai oleh AIIB membantu meningkatkan konektivitas ekonomi dan memperbaiki infrastruktur di kawasan-kawasan yang strategis bagi Belt and Road Initiative (BRI), yang juga merupakan bagian dari strategi besar *soft power* Tiongkok (Chen & Liu, 2020).

Sebagai lembaga multilateral yang inklusif, AIIB menawarkan solusi pembiayaan yang lebih fleksibel dan tidak memberatkan dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan tradisional seperti IMF atau *World Bank*. Pendekatan ini menarik bagi negara-negara berkembang yang membutuhkan pendanaan infrastruktur tanpa harus terikat pada syarat-syarat politik yang sering diberlakukan oleh lembaga-lembaga keuangan Barat. Fleksibilitas ini memberikan keuntungan diplomatik bagi Tiongkok, dimana AIIB berhasil membangun reputasi sebagai lembaga yang lebih adil dan kooperatif dibandingkan dengan lembaga keuangan internasional yang didominasi negara-negara Barat (Wilson, 2019)

AIIB juga berperan penting dalam mendukung tujuan Tiongkok untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan Asia dan sekitarnya. Dengan menawarkan alternatif pendanaan yang lebih fleksibel dan ramah dibandingkan lembaga-lembaga keuangan tradisional, AIIB mampu menarik minat banyak negara

berkembang yang sebelumnya merasa kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan infrastruktur. Proyek-proyek yang didanai AIIB, seperti pembangunan jaringan transportasi di Asia Tenggara dan pembangunan energi terbarukan di Asia Selatan, membantu memperkuat hubungan bilateral antara Tiongkok dan negara-negara penerima bantuan (Liu, 2021). Negara-negara yang mendapatkan bantuan pembiayaan dari AIIB cenderung memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Tiongkok, seringkali mendukung kebijakan luar negeri Tiongkok di forum-forum internasional seperti PBB. Dengan cara ini, Tiongkok memanfaatkan AIIB sebagai platform untuk memperkuat posisinya di panggung global dan mengamankan dukungan politik dari negara-negara berkembang.

Major Projects			
Year	Country	Sector	Project
2016	Bangladesh	Power	Distribution System Upgrade and Expansion
2016	Tajikistan	Transport	Dushanbe-Uzbekistan Border Road Improvement
2016	Pakistan	Transport	National Motorway M-4
2017	India	Transport	Bangalore Metro Rail Project
2018	India	Transport	Andhra Pradesh Rural Roads
2018	India	Water	Andhra Pradesh Urban Water Supply
2019	Russia	Transport	Infrastructure Development Program
2020	Turkey	Finance	COVID-19 Credit Line Project
2020	Indonesia	Economic Resilience	COVID-19 Active Response and Expenditure Support Program

Source: Asian Infrastructure Investment Bank

CGTN

Gambar 2. 4 Proyek Besar AIIB

Sumber: CGTN, 2021

Salah satu cara AIIB memperkuat citra positif Tiongkok adalah dengan mempromosikan agenda pembangunan hijau dan ramah lingkungan. Proyek-proyek infrastruktur yang didanai oleh AIIB seringkali didesain untuk memenuhi

standar lingkungan internasional, termasuk dalam hal emisi karbon dan penggunaan energi terbarukan. Langkah ini sejalan dengan komitmen global untuk menanggulangi perubahan iklim dan memperkuat posisi Tiongkok sebagai negara yang peduli terhadap isu-isu global (Cheng, 2019). Banyak proyek infrastruktur yang didanai oleh AIIB dirancang untuk memenuhi standar lingkungan internasional, seperti penggunaan energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon. Komitmen ini sejalan dengan upaya global untuk menangani perubahan iklim, sehingga semakin memperkuat citra Tiongkok sebagai negara yang bertanggung jawab di ranah global.

Melalui AIIB, Tiongkok juga berusaha membangun aliansi diplomatik yang kuat di kawasan-kawasan strategis seperti Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Negara-negara penerima pendanaan AIIB cenderung memiliki pandangan yang lebih positif terhadap Tiongkok dan seringkali mendukung kebijakan luar negeri Tiongkok di forum-forum internasional seperti PBB. Ini merupakan bagian dari strategi diplomasi ekonomi Tiongkok yang menggunakan bantuan pembangunan sebagai alat untuk memperkuat posisi geopolitiknya di dunia (Zhang, 2018). AIIB tidak hanya berfungsi sebagai alat diplomasi ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen *soft power* yang efektif bagi Tiongkok dalam membangun citra positif di kancah global. AIIB memberikan Tiongkok peluang untuk menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan global, sekaligus memperluas pengaruh politik dan diplomatiknya di berbagai kawasan strategis (Kurlantzick, 2017).

2.5 Mekanisme Pemberian Dana Pinjaman Pembangunan Infrastruktur AIIB

Secara operasional, AIIB berfokus pada pembiayaan proyek pembangunan infrastruktur, terutama dalam bentuk investasi ekuitas dan jaminan. Bank ini menawarkan pinjaman jangka panjang dengan suku bunga kompetitif yang ditujukan untuk pembangunan ekonomi negara-negara penerima. Tujuannya adalah untuk memperkuat konektivitas dan integrasi regional di Asia. Mekanisme pemberian pinjaman ini tidak hanya bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi, tetapi juga untuk menciptakan dampak sosial yang lebih luas melalui peningkatan akses infrastruktur bagi populasi yang lebih besar, yang sejalan dengan misi bank untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Beniflah et al., 2016).

Mekanisme pemberian dana oleh AIIB dirancang untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur yang berkelanjutan dan memiliki dampak ekonomi yang signifikan. AIIB bekerja sama dengan pemerintah negara penerima dan sektor swasta untuk merancang proyek-proyek yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga sesuai dengan standar internasional dalam hal keberlanjutan dan tanggung jawab sosial (AIIB, 2022). AIIB menerapkan mekanisme pemberian pinjaman yang sangat mengedepankan transparansi, keberlanjutan, dan inklusivitas. Setiap proyek yang didanai oleh AIIB harus melalui proses seleksi dan evaluasi yang komprehensif. Sebagai bagian dari prinsip-prinsip tata kelola yang baik, AIIB menekankan pada tiga aspek utama dalam setiap tahap pendanaan: penilaian dampak lingkungan, penilaian sosial, dan keberlanjutan finansial.

Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai oleh AIIB tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi bagi negara penerima, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas serta melindungi lingkungan

Dalam hal pendanaan, AIIB menawarkan berbagai instrumen keuangan, termasuk pinjaman langsung, investasi ekuitas, dan jaminan kredit. Pinjaman yang diberikan oleh AIIB biasanya memiliki suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan komersial, serta jangka waktu pembayaran yang lebih panjang. Ini membuat AIIB menjadi pilihan yang menarik bagi negara-negara berkembang yang memiliki keterbatasan dalam mengakses pembiayaan internasional (Kaplan, 2016). Proses seleksi proyek AIIB melibatkan beberapa tahap, mulai dari identifikasi proyek oleh negara anggota atau mitra sektor swasta, penilaian kelayakan proyek oleh tim ahli AIIB, hingga persetujuan akhir oleh dewan direksi AIIB. Salah satu keunggulan AIIB adalah kemampuannya untuk menawarkan syarat pinjaman yang lebih fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan internasional lainnya, yang seringkali memberlakukan syarat-syarat ketat yang bersifat politik atau ekonomis. Dengan demikian, AIIB mampu menyediakan alternatif pendanaan yang lebih terjangkau dan menguntungkan bagi negara-negara berkembang

AIIB juga secara aktif berkolaborasi dengan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di negara-negara anggotanya. Kolaborasi ini dilakukan melalui kemitraan publik-swasta yang melibatkan investor swasta,

yang berperan dalam pendanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan proyek-proyek besar. Pendekatan ini tidak hanya memperluas sumber pendanaan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan keahlian teknis dalam pelaksanaan (Garcia-Herrero & Xu, 2020). Di Indonesia, AIIB bekerja sama dengan perusahaan konstruksi lokal dan asing untuk mengimplementasikan proyek-proyek yang kompleks. Proyek Mandalika Urban and Tourism Infrastructure di Lombok yang didanai oleh AIIB adalah contoh nyata dari keterlibatan sektor swasta. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur pariwisata berkelanjutan di daerah tersebut, sekaligus memperkuat ekonomi lokal dan menarik lebih banyak investasi asing

AIIB juga menggunakan pendekatan yang inklusif dalam memilih proyek-proyek yang akan didanai. Setiap negara anggota memiliki hak untuk mengajukan proposal proyek, dan proses seleksi dilakukan berdasarkan meritokrasi, dimana proyek yang memiliki dampak ekonomi terbesar dan memenuhi standar keberlanjutan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pendanaan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip AIIB untuk mempromosikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan Asia dan sekitarnya (AIIB, 2022). Salah satu aspek yang membuat AIIB unggul dalam mekanisme pendanaan adalah komitmennya terhadap penerapan standar internasional yang ketat dalam hal teknologi, manajemen proyek, dan keberlanjutan. Proyek-proyek yang didanai AIIB tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan. Misalnya, proyek transportasi perkotaan di Jakarta yang didanai AIIB

menggunakan teknologi pintar untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi transportasi publik

Kriteria keberlanjutan yang diterapkan AIIB mencakup peningkatan akses ke infrastruktur dasar, pengurangan kemiskinan, serta penciptaan lapangan kerja. AIIB juga berupaya untuk memitigasi dampak negatif terhadap masyarakat lokal dengan memastikan bahwa setiap proyek yang didanai mematuhi standar perlindungan lingkungan yang ketat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan mekanisme pendanaan yang komprehensif ini, AIIB telah memainkan peran penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai negara di Asia dan sekitarnya. AIIB berhasil menggabungkan pendekatan inklusif, ramah lingkungan, dan inovatif dalam setiap proyeknya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan infrastruktur negara-negara berkembang dengan cara yang berkelanjutan

Masuknya AIIB ke Indonesia terjadi pada saat yang sangat tepat, dimana pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sedang gencar mempromosikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama. Pada awal masa jabatannya, Joko Widodo meluncurkan program ambisius untuk membangun infrastruktur nasional, termasuk jalan tol, pelabuhan, dan bandara, yang membutuhkan investasi besar-besaran. Keterlibatan AIIB dalam mendanai proyek-proyek ini menawarkan solusi penting bagi Indonesia dalam menutupi kekurangan pendanaan yang dibutuhkan untuk mewujudkan ambisi pembangunan tersebut (PUPR, 2016).

Salah satu proyek besar yang didukung oleh AIIB di Indonesia adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga air di wilayah Sumatera dan proyek pengembangan sistem transportasi perkotaan di Jakarta. Proyek-proyek ini tidak hanya membantu memperbaiki infrastruktur Indonesia, tetapi juga sejalan dengan komitmen AIIB untuk mendanai proyek-proyek yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Keberhasilan proyek-proyek ini juga memperkuat hubungan bilateral antara Tiongkok dan Indonesia, dengan Tiongkok mendapatkan citra positif sebagai mitra pembangunan yang andal (Lim, 2020).

Bagi Tiongkok, keterlibatan AIIB di Indonesia tidak hanya memberikan keuntungan dalam hal citra positif, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang signifikan. Banyak proyek infrastruktur yang didanai oleh AIIB melibatkan perusahaan-perusahaan konstruksi dan teknik asal Tiongkok, yang mendapatkan kontrak bernilai miliaran dolar. Selain itu, proyek-proyek ini juga memungkinkan Tiongkok untuk memperkuat aksesnya ke pasar-pasar strategis di Asia Tenggara, yang merupakan kawasan penting dalam konteks Belt and Road Initiative (BRI) (Zhang, 2018).

Secara geopolitik, keterlibatan AIIB di Indonesia juga memperkuat pengaruh Tiongkok di kawasan Asia Tenggara. Dengan mendanai proyek-proyek infrastruktur yang krusial, Tiongkok berhasil membangun aliansi strategis dengan negara-negara di kawasan tersebut. Di tengah persaingan geopolitik yang semakin ketat di Asia Tenggara, keterlibatan AIIB membantu memperkuat posisi Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi dan politik yang dominan di kawasan (Dollar, 2018).

Dengan demikian, AIIB tidak hanya memberikan keuntungan finansial bagi Indonesia, tetapi juga memperkuat hubungan diplomatik dan ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Bagi Tiongkok, keterlibatan AIIB di Indonesia merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara.

2.6 Strategi Pembiayaan AIIB di Indonesia

AIIB menerapkan tiga aspek utama dalam strategi pembiayaannya: Pertama, pendekatan *pro-poor* dengan menyalurkan kredit mikro untuk kawasan kumuh. Kedua, inergi multilateral melalui co-financing bersama ADB, World Bank, dan lembaga bilateral. Ketiga, insentif hijau dengan memprioritaskan proyek energi terbarukan serta infrastruktur tahan bencana, semua dijalankan berdasar prinsip Environmental and Social Framework AIIB (AIIB, 2021). Sebagai contoh pendanaan peremajaan bendungan Karian (USD 150 juta) menyertakan klausul penggunaan teknologi pemantauan air terbaru, sekaligus membuka peluang investasi sektor swasta domestik dalam layanan pengoperasian bendungan (Wang, 2020).

AIIB menerapkan pendekatan pembiayaan infrastruktur yang mengedepankan prinsip *lean, clean, and green*. Strategi pendanaannya mencakup tiga skema utama: *sovereign-backed financing*, *non-sovereign-backed financing*, dan *co-financing* bersama lembaga seperti World Bank dan ADB. AIIB menggunakan model leverage untuk meningkatkan kapasitas pinjamannya hingga

beberapa kali dari modal dasar, yang mayoritas berasal dari kontribusi negara anggota, terutama Tiongkok (AIIB, 2020).

Selain itu, AIIB fokus pada proyek yang selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs), seperti energi terbarukan, urbanisasi berkelanjutan, dan transportasi publik. Kelebihan AIIB dibandingkan World Bank atau ADB adalah fleksibilitasnya dalam persyaratan dan waktu pencairan dana. AIIB juga mendorong partisipasi sektor swasta, serta mendukung negara penerima dalam kapasitas teknis melalui *technical assistance* (Cheng, 2019).

Keseluruhan strategi ini dijalankan dengan acuan Environmental and Social Framework AIIB (2021), yang menekankan keberlanjutan, keterlibatan masyarakat, dan penguatan kapasitas institusi lokal. Di sisi lain, proyek-proyek ini juga memberi ruang bagi partisipasi sektor swasta nasional, memperlihatkan bahwa AIIB berupaya menciptakan sinergi antara pembangunan ekonomi dan perluasan pengaruh Tiongkok dalam jangka panjang (Wang, 2020). AIIB tidak sekadar berfungsi sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai media diplomasi ekonomi yang efektif.

2.7 Peran AIIB di Kawasan Asia Tenggara

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) muncul sebagai kekuatan besar di kawasan Asia Tenggara sejak didirikan pada tahun 2015. Tujuan utama AIIB adalah mendukung pembangunan infrastruktur di kawasan Asia dengan menawarkan pembiayaan yang lebih fleksibel dan inklusif, terutama bagi negara-negara berkembang. Di Asia Tenggara, peran AIIB semakin menguat karena

kebutuhan infrastruktur yang mendesak dan keterbatasan pendanaan domestik. Bagi Indonesia, salah satu negara anggota pendiri AIIB, bank ini menawarkan solusi penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur nasional yang selama ini menjadi tantangan besar. Namun, keberadaan AIIB juga menimbulkan dilema antara potensi keuntungan ekonomi dan risiko geopolitik yang terkait dengan pengaruh Tiongkok sebagai penggagas utama AIIB.

Dalam hal keuntungan, AIIB menawarkan pembiayaan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan multilateral lainnya seperti *World Bank* dan *Asian Development Bank* (ADB). Misalnya, AIIB tidak memberlakukan syarat politik yang ketat seperti yang sering diterapkan oleh *World Bank* atau IMF. Hal ini memberikan ruang bagi negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, untuk mengakses pendanaan tanpa harus tunduk pada tekanan politik atau reformasi struktural yang tidak diinginkan (AIIB, 2017). Pada periode 2016-2018, Indonesia menerima pendanaan dari AIIB untuk beberapa proyek infrastruktur utama, termasuk proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sumatra dan proyek pengembangan transportasi di Jakarta. Proyek-proyek ini memperkuat konektivitas domestik dan meningkatkan kapasitas energi, yang keduanya merupakan aspek vital bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada tahun 2017, AIIB menyetujui pendanaan untuk proyek Jakarta Urban Transport sebesar USD 216,5 juta, yang bertujuan untuk meningkatkan sistem transportasi publik di ibu kota Indonesia (AIIB, 2017). Proyek ini tidak hanya berkontribusi pada pengurangan kemacetan di kota terbesar di Indonesia, tetapi juga

mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dengan memperbaiki infrastruktur transportasi massal. Dengan demikian, AIIB memberikan keuntungan langsung bagi masyarakat Indonesia, karena infrastruktur yang lebih baik akan memperbaiki produktivitas ekonomi, mengurangi biaya transportasi, dan meningkatkan mobilitas penduduk. Manfaat jangka panjang dari proyek ini juga terlihat dalam peningkatan daya saing Jakarta sebagai pusat ekonomi di Asia Tenggara.

Selain itu, AIIB juga mendanai proyek PLTA di Sumatra pada tahun 2016 dengan nilai investasi sebesar USD 100 juta (AIIB, 2016). Proyek ini penting dalam konteks Indonesia yang tengah berupaya meningkatkan penggunaan energi terbarukan untuk mencapai target pengurangan emisi karbon. PLTA Sumatra merupakan bagian dari strategi nasional Indonesia untuk meningkatkan ketahanan energi melalui diversifikasi sumber energi, terutama dengan beralih dari bahan bakar fosil ke energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Proyek ini tidak hanya memberikan pasokan listrik tambahan bagi wilayah Sumatra, tetapi juga mendukung komitmen global Indonesia untuk menurunkan jejak karbon. Hal ini menunjukkan bahwa AIIB memainkan peran penting dalam membantu Indonesia mencapai target pembangunan berkelanjutan, yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga melindungi lingkungan.

Namun dibalik keuntungan ekonomi yang ditawarkan, keberadaan AIIB juga menghadirkan risiko geopolitik. AIIB, meskipun multilateral, didominasi oleh Tiongkok yang memegang 28% hak suara (AIIB, 2020). Pengaruh dominan

Tiongkok dalam AIIB menimbulkan kekhawatiran bahwa bank ini dapat digunakan sebagai alat kebijakan luar negeri Tiongkok, terutama dalam mendukung proyek ambisius Belt and Road Initiative (BRI) yang diluncurkan oleh Presiden Xi Jinping pada tahun 2013. BRI bertujuan untuk memperluas pengaruh ekonomi dan politik Tiongkok dengan membangun infrastruktur di seluruh Asia dan Eropa, termasuk di Asia Tenggara. Melalui AIIB, Tiongkok dapat mendorong proyek-proyek yang sejalan dengan kepentingan strategisnya di kawasan, yang berpotensi menimbulkan ketergantungan negara-negara penerima terhadap Beijing (Dollar, 2018).

Bagi Indonesia, ketergantungan pada pendanaan dari AIIB dapat menimbulkan ancaman dalam jangka panjang. Dengan AIIB yang semakin banyak membiayai proyek infrastruktur besar di Indonesia, ada risiko bahwa kepentingan Tiongkok dapat mulai mempengaruhi kebijakan nasional. Misalnya, dalam kerangka BRI, proyek infrastruktur yang dibiayai AIIB seringkali melibatkan perusahaan-perusahaan Tiongkok dalam konstruksi dan operasinya. Ini berarti Indonesia mungkin harus bergantung pada teknologi, manajemen proyek, dan bahkan tenaga kerja dari Tiongkok, yang dapat membatasi kemandirian Indonesia dalam mengembangkan kemampuan infrastruktur domestiknya. Selain itu, ketergantungan yang besar pada pendanaan Tiongkok juga dapat mengganggu posisi kebijakan luar negeri Indonesia yang selama ini menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Meski demikian, penting untuk diakui bahwa AIIB memberikan peluang signifikan bagi Indonesia untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang

sangat dibutuhkan. *World Bank* memperkirakan bahwa Indonesia membutuhkan investasi infrastruktur sebesar USD 1,5 triliun hingga tahun 2030 untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil (World Bank, 2016). Keterlibatan AIIB dalam pembiayaan proyek-proyek besar, seperti pengembangan infrastruktur transportasi dan energi, membantu mengisi celah pendanaan yang tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh anggaran pemerintah dan sumber pendanaan lainnya. Keuntungan dari proyek-proyek ini sangat jelas, baik dari segi peningkatan daya saing ekonomi, penciptaan lapangan kerja, maupun peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Di Asia Tenggara secara keseluruhan, AIIB juga telah memberikan kontribusi besar pada pembangunan infrastruktur. Sebagai contoh, proyek pengembangan pelabuhan di Vietnam dan pembangunan jalan tol di Filipina yang didanai oleh AIIB telah mempercepat integrasi ekonomi di kawasan tersebut, meningkatkan konektivitas antarnegara, dan mendorong pertumbuhan perdagangan intra-kawasan (Cheng, 2019). Bagi Asia Tenggara, AIIB berfungsi sebagai katalisator penting dalam upaya regional untuk mencapai integrasi ekonomi yang lebih dalam, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing kawasan di pasar global (AIIB, 2020).

Dalam konteks ini, keberadaan AIIB lebih membantu daripada menjadi ancaman, terutama jika Indonesia mampu mengelola risiko yang terkait dengan ketergantungan ekonomi dan geopolitik. Indonesia dapat memanfaatkan AIIB sebagai salah satu alat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa harus

sepenuhnya bergantung pada bank tersebut. Pendekatan yang cerdas dan hati-hati diperlukan dalam memanfaatkan pendanaan AIIB, dengan tetap menjaga kebijakan luar negeri yang mandiri dan memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai benar-benar sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia (Liao, 2018).

AIIB juga memainkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur di Asia Tenggara dengan memberikan pembiayaan bagi berbagai proyek strategis di beberapa negara, yang mencerminkan pendekatan multilateralnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional. Di Vietnam, AIIB mengalokasikan USD 140 juta untuk pengembangan Pelabuhan Lach Huyen di Hai Phong pada 2019, yang meningkatkan kapasitas pelabuhan untuk menampung kapal besar, sehingga mendorong perdagangan internasional dan efisiensi logistik. Filipina juga mendapatkan manfaat signifikan melalui proyek Jalan Tol Davao City Bypass dengan nilai USD 380 juta pada 2020, yang memangkas waktu perjalanan dari 1 jam 44 menit menjadi hanya 49 menit, meningkatkan konektivitas regional dan menarik investasi baru (Xu, 2020).

Di Laos, proyek Hidroelektrik Nam Ngiep 1 dengan pendanaan USD 80 juta pada 2017 membantu negara tersebut memperkuat statusnya sebagai pemasok energi regional (AIIB, 2017), sementara Myanmar pada 2019 menerima USD 70 juta untuk proyek irigasi yang meningkatkan produktivitas pertanian di kawasan tengah negara (Cheng, 2019). Thailand mendapatkan pendanaan sebesar USD 300 juta untuk perluasan MRT di Bangkok pada 2018, yang mengurangi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan efisiensi transportasi (AIIB, 2018).